



Kahar

RBP GCF REDD+ SULTENG OUTPUT2

Edisi Delapan | Juli - September 2026

PADIATAPA Sebagai Pondasi
Utama dalam Program Iklim.

Sulawesi Tengah
Perkuat GEDSI dalam
Tata Kelola Program.

Cegah Kebakaran,
Dinas Kehutanan Perkuat
Brigdal Karhutla di Sulawesi Tengah

Tingkatkan Nilai Ekonomi
Kelompok Pemanfaat Hutan,
Dinas Kehutanan Beri Bantuan
Alat Produksi

Perempuan Tangguh
Penjaga Kelestarian Hutan

Menjadi Penjaga Masa Depan Hutan



Menjadi Penjaga Masa Depan Hutan

Aksi iklim yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada upaya menjaga hutan, tetapi juga pada bagaimana melibatkan menghormati hak-hak masyarakat, serta memperkuat kapasitas para pihak. Inilah bagian dari upaya yang dilakukan oleh Program RBP GCF REDD+ Sulawesi Tengah yang terekam dalam edisi Juli hingga September 2026.

Tata kelola yang inklusif menjadi fondasi penting agar program iklim dapat berjalan efektif, adil, dan mendapat dukungan dari masyarakat. Pada implementasinya, penguatan implementasi PADIATAPA dan GEDSI dalam pengelolaan dan perlindungan hutan juga dilakukan untuk memastikan keterlibatan kelompok rentan dalam setiap proses pembangunan.

Meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan mengingatkan kita bahwa ketangguhan menghadapi perubahan iklim harus terus diperkuat. Peningkatan kapasitas Brigade Pengendalian Karhutla dan Masyarakat Peduli Api sebagai ujung tombak penjaga hutan dan lahan dilakukan untuk membangun kesiapsiagaan, pencegahan, dan respons cepat dalam melindungi ekosistem Sulawesi Tengah.

Pada sisi lain, upaya menjaga hutan juga perlu menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Penguatan kepada kelompok perhutanan sosial dan kelompok tani hutan dilakukan untuk memperlihatkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh sejalan dengan pengelolaan hutan yang lestari. Ketika nilai ekonomi hasil hutan meningkat, masyarakat semakin memiliki alasan kuat untuk menjaga sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupannya.

Edisi ini turut menghadirkan kisah Sepriani Jome, penyuluh kehutanan yang membuktikan bahwa perubahan sering dimulai dari kerja-kerja pendampingan yang konsisten. Dedikasinya telah membuktikan bahwa keberhasilan program pada akhirnya ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah, pendamping, dan masyarakat di tingkat tapak.

Berbagai cerita dalam newsletter ini menunjukkan bahwa keberhasilan aksi iklim dibangun melalui kolaborasi, partisipasi, dan penguatan kapasitas yang terus dilakukan. Ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi, hutan yang lestari dan kesejahteraan yang berkelanjutan bukan lagi utopia, melainkan realita yang dapat diwujudkan bersama.

Selamat membaca



PADIATAPA Sebagai Pondasi Utama dalam Program Iklim.

Prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) merupakan salah satu syarat dan ketentuan mutlak yang wajib dipenuhi dalam setiap program iklim, termasuk pada implementasi program RBP GCF REDD+ Sulawesi Tengah.

Untuk memperkuat kapasitas implementasinya di lapangan, Dinas Kehutanan bersama KEMITRAAN melaksanakan kegiatan lokatitih kepada 40 perwakilan dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, CSO, Akademisi, KPH dan Tahura selaku penerima manfaat utama program.

Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan dari Masyarakat Adat, Dinas Kehutanan, Akademisi Universitas Tadulako, dan Akademisi Universitas Gajah Mada sebagai fasilitator serta narasumber. Mereka menyampaikan materi tentang pengalaman implementasi dan pembelajaran pelaksanaan padiatapa di program kehutanan serta iklim tingkat tapak, serta bagaimana membuat pelaporannya.

Ir. Nurudin SP.,M.Si.,PU, Kepala KPH Dampelas Tinombo, menyampaikan bahwa penghormatan atas hak masyarakat dalam program kehutanan menjadi pilar penting yang harus dilakukan.



“Padiatapa merupakan fondasi untuk memastikan setiap pelaksanaan program tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut, beliau juga menekankan pentingnya pelibat masyarakat adat dan kelompok rentan dalam kegiatan yang berhubungan dengan kehutanan.

“Secara historis masyarakat adat memiliki peran penting terhadap hutan dalam menjaga, merawat dan memanfaatkannya,” sebutnya.

Senada dengan Kepala KPH, Kiki Rizki Amalia, Project Officer PMU KEMITRAAN, menjelaskan bahwa pelatihan ini sebagai bentuk memperkuat pemahaman penerima manfaat program seputar padiatapa sebagai bagian dari safeguard,

memastikan setiap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat harus diawali dengan sosialisasi dan permintaan persetujuan.

“Padiatapa menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan hubungan antara masyarakat dengan pihak luar. Melalui mekanisme ini, hak masyarakat atas tanahnya dihormati, sehingga mereka memiliki kendali penuh untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujarnya.

Saat ini, pelaksanaan padiatapa telah dilaksanakan dalam beberapa implementasi kegiatan oleh KPH dan Tahura, antara lain: pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, pelaksanaan patroli, penyelesaian konflik dan kegiatan perhutanan sosial.

Kiki berharap, pasca pelatihan ini semua KPH dan Tahura menginternalisasi prinsip Padiatapa kedalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehutanan, hal ini untuk memastikan pengelolaan hutan sesuai sasaran dan mencegah potensi kerusakan serta konflik pengelolaan.

Sulawesi Tengah Perkuat GEDSI dalam Tata Kelola Program.



Sebagai bagian dari komitmen mengimplementasikan instrument perlindungan terhadap lingkungan dan sosial, program RBP GCF REDD+ Output 2 menjalankan pelatihan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) kepada 60 orang peserta yang terdiri dari Anggota Pokja REDD+, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, akademisi, CSO, KPH dan Tahura.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pihak, terutama penerima manfaat program tentang pengarusutaman GEDSI dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh KEMITRAAN beserta Dinas Kehutanan mewajibkan perwakilan dari masing-masing lembaga mengirimkan peserta laki-laki dan perempuan secara berimbang, sebagai bentuk penerapan prinsip kesetaraan gender.

Rini Hestiestu, perwakilan dari KPH Banawa Lalundu, menyebut bahwa partisipasi perempuan dan kelompok rentan masih menjadi tantangan, terutama pada kegiatan yang sifatnya operasional seperti patroli dan penanganan kasus, karena dianggap menjadi urusan laki – laki.

Oleh karena itu, ia berharap pelatihan ini dapat mengubah kondisi di lapangan.

“Pelatihan ini, memberikan kami gambaran tentang bentuk partisipasi dan pengklasifikasian kegiatan, untuk memetakan bentuk keterlibatan perempuan kelompok rentan dan perempuan serta kebutuhannya,” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber pelatihan adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta yakni Uli Arta Pangaribuan, dan Koordinator Pelayanan Hukum, Tuani Sondang. Mereka menyampaikan banyak hal mulai dari konsep dasar GEDSI, sex dan gender, serta identifikasi kasus.

Edy Wicaksono, Koordinator Program PMU KEMITRAAN, menyebut prinsip GEDSI memiliki hubungan strategis dengan implementasi program REDD+ di Sulawesi Tengah, karena memastikan seluruh aksi mitigasi perubahan iklim berjalan secara efektif, inklusif, dan berkeadilan.

“Integrasi GEDSI harus di terapkan pada seluruh siklus program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan,” terangnya.

Edy menyebut, saat ini telah terdapat beberapa praktik baik yang telah dilakukan, salah

satunya di KPH Sivia Patuju. Menurut Edy, KPH yang terletak di Kabupaten Tojo una-una telah mengimplementasikan 30% keterwakilan perempuan dalam kegiatan program, di antaranya saat penyusunan dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS), pelatihan inventarisasi potensi serta pengembangan produk hasil hutan bukan kayu, pelatihan aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan untuk mencatat, menelusuri dan mengawasi peredaran hasil hutan secara elektronik (SIPPUH), pelatihan penguatan kapasitas tenaga teknis pengelola hutan (GANISPH).

Setelah pelatihan, masing - masing perwakilan diminta menyusun rencana tindak lanjut, yakni menyusun rencana implementasi pengarusutamaan GEDSI pada setiap pelaksanaan kegiatan di lembaga masing-masing.



Cegah Kebakaran.

Dinas Kehutanan Perkuat Brigdal Karhutla di Sulawesi Tengah



Jumlah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan data SIPONGI Kementerian Kehutanan, luas Karhutla sampai bulan Agustus 2026 mencapai 3.138,10 Ha atau meningkat lebih dari tiga kali lipat dibanding periode tahun 2025.

Kebakaran seluas 1.125,58 hektar terjadi di wilayah Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), di hutan produksi terbatas 382,95 hektare, hutan produksi 215,14 hektare, hutan lindung 48,08 hektare dan hutan konservasi 22,02 hektare.

Berdasarkan kondisi tersebut, program RBP GCF REDD+ Sulawesi Tengah melalui kegiatan Participatory Fire Management bersama Dinas

Kehutanan Bidang Pengendalian Karhutla memperkuat Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdal Karhutla), yaitu tim khusus yang bertugas melakukan pencegahan, patroli, dan pemadaman api yang ada di KPH dan Tahura.

Sebanyak 42 orang anggota Polisi Hutan (Polhut) perwakilan dari 13 KPH dan Tahura mendapat pelatihan tentang metode pemadaman api, analisis cuaca, potensi kebakaran hutan beserta pencegahannya. Hadir sebagai narasumber di antaranya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai pengendalian Karhutla (Dalkarhut), dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).



Sekretaris Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Abdul Rahman, menyampaikan Karhutla harus dicegah, karena merupakan ancaman serius terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

“Brigade tidak boleh hanya hadir ketika api sudah membesar. Pencegahan, deteksi dini dan respons cepat harus menjadi bagian utama dari tugas di lapangan,” ujarnya.

Kiki Rizki Amalia Project Officer, menyebut “Karhutla merupakan ancaman tahunan ketika musim kemarau di Sulawesi Tengah, akibat dampak perubahan iklim. Penguatan kapasitas Brigdal di 13 KPH dan Tahura, menjadi bagian dalam mempersiapkan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan saat ini hingga masa yang akan datang,” terangnya.

Selain penguatan Brigdal, Program RBP GCF bersama Dinas Kehutanan juga memfasilitasi peningkatan kapasitas 71 Masyarakat Peduli Api (MPA) di 13 KPH untuk pencegahan kebakaran hutan di tingkat desa. Selain pelatihan, Baik Brigdal Karhutla maupun MPA mendapat peningkatan kapasitas berupa bantuan sarana dan prasarana, antara lain penyediaan sapras untuk mendukung operasional kebakaran hutan dan pembentukan posko Crisis Response Unit (CRU) di empat kabupaten, zona paling rentan yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una – Una dan Kabupaten Morowali Utara.



Tingkatkan Nilai Ekonomi Kelompok Pemanfaat Hutan, Dinas Kehutanan Beri Bantuan Alat Produksi



Berkomitmen meningkatkan nilai ekonomi hutan melalui Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berikan bantuan kepada 31 kelompok perhutanan sosial (KPS) dan 27 kelompok tani hutan non-PS (KTH Non-PS) dampingan yang tersebar di 13 kabupaten. Bantuan yang diberikan berupa alat produksi untuk mendukung kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan non hutan.

Secara simbolis bantuan diserahkan langsung oleh Ir. Susanto Wibowo, S.Hut., M.Si., IPU, Kepala Dinas Kehutanan kepada KUPS Kakafu dan Pala KTH Bambu Kuning dan Tunas Hijau di Kantor KPH Banawa Lalundu.

“Kami berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik baiknya dan dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan produk dalam pemanfaatan hutan dan non hutan,” harapnya.

Imran ketua kelompok KTH Kakafu, menyebut bahwa bantuan ini sangat bermanfaat bagi kelompoknya dalam meningkatkan kualitas panen kemiri.

“Sebelumnya kemiri dipanen langsung dan dijual dengan harga jual per-Kg Rp. 7000 - 8000. Adanya bantuan mesin pencacah kulit kemiri harga jual dapat mencapai Rp 15000 - 20.000 dipasar,” terangnya.

Respon serupa juga disampaikan oleh Ibu Rafiq, anggota kelompok KTH Bambu Kuning yang mengembangkan pala.

“Pala tidak hanya dipanen dan dijemur lagi. Dengan adanya bantuan mesin pencacah kulit pala ini, hasil panen dapat diolah menjadi manisan dan dijual ke pasar langsung tanpa melalui pengempul,” ujarnya.

Untuk memastikan pemberian bantuan sesuai dengan kelompok sasaran, pendamping PS dan



KTH di masing-masing KPH melakukan identifikasi target. Adapun kriterianya kelompok aktif dan memiliki produk usaha yang telah dikembangkan.

Edy Wicaksono Project Manager RBP GCF REDD+, menyebut pemberian bantuan kepada kelompok pemanfaat hutan merupakan bagian dari serangkaian aktivitas untuk mendukung pemanfaatan hutan secara lestari dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Sebelum dukungan alat produksi, kegiatan perhutanan sosial yang telah dilakukan bersama KPH ialah penandaan pal batas, inventarisasi potensi, penyusunan rencana kerja usaha, membangun kerja sama usaha dan peningkatan kapasitas kelompok,” jelasnya.

Adapun kelompok PS dan KTH yang mendapat dukungan alat produksi kelompok anyaman rotan, bambu, pandan hutan, madu, kopi, ubi, kelapa, kemiri, pala, cengkeh dan peternak.





KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

81

INDONESIA
MERDEKA
ABDI, DAN
MAJU

KATEGORI
PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TERBAIK III

SEPRIANI JOME, S.HUT.

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH, KPH TOILI BATURUBE



Perempuan Tangguh

Penjaga Kelestarian Hutan

Sepriani Jome S.Hut adalah salah satu dari sedikit perempuan penyuluh kehutanan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih dari 11 tahun hidupnya dibaktikan untuk menjadi penyuluh serta pemberdaya masyarakat yang hidup di sekitar wilayah hutan, untuk memastikan hutan yang ada di wilayah dampingannya dikelola secara lestari.

Tahun 2024, Sepriani mendapat pelatihan dari program RBP GCF REDD+ Output2 berupa pelatihan seputar identifikasi, penyelesaian serta mitigasi masalah di tingkatan kelompok dan metode pendampingan. Hal ini menjadikannya lebih memahami peta konflik tenurial dan merumuskan metode pendekatan persuasif di lapangan.

Pelatihan ini membuat Sepriani semakin memahami metode perencanaan, serta penyelesaian masalah yang terjadi di kelompok dampingan, seperti perselisihan antara anggota dan pengurus, fraud, dan manajemen usaha kelompok.

Sebagai seorang penyuluh, Sepriani kerap bolak-balik mengunjungi 56 Kelompok Tani Hutan (KTH) di 25 desa yang tersebar di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara. Pasca pelatihan, ia memasukan materi potensi konflik tenurial saat penyuluhan ke wilayah dampingannya.

Selama pendampingan, sosok yang dikaruniai tiga orang anak ini berhasil membantu penguatan kelompok-kelompok dampingan. Misalnya memfasilitasi kelompok Pandan Wangi dalam menyusun dokumen rencana pengelolaan hutan selama 10 tahun ke depan.

Ia juga mendampingi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada dua kelompok

Hutan Rakyat, dan Kelompok Perhutanan Sosial (PS) Desa Koyoan dengan penanaman lebih dari 90 ribu batang pohon, peningkatan kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial serta memfasilitasi kerja sama usaha di 6 kelompok yakni tiga kelompok usaha damar dan tiga kelompok pengelola rotan.

Keberhasilan Sepriani sebagai penyuluh diakui oleh Aries Widjajanto, SH., S.Hut, Kepala KPH Toili Baturube yang menyebutnya sebagai tulang punggung kegiatan perhutanan sosial di kesatuannya.

“Sepriani Jome merupakan tulang punggung kami di KPH Toili Baturube dalam melaksanakan kegiatan PS. Totalitas dan semangat beliau memberikan dampak nyata bagi peningkatan kelompok,” terangnya.

Tidak hanya dari kesatuannya, keberhasilannya menjadi penyuluh juga mendapat penghargaan dari Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni berupa Wana Lestari 2026. Sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada perorangan, kelompok, aparatur pemerintah, hingga badan usaha dalam menjaga, melestarikan, serta membangun ekosistem hutan dan lingkungan hidup di Indonesia.

Sepriani menyebut penghargaan yang diterimanya sebagai bagian dari hasil kerja Bersama semua pihak, terutama kelompok binaan yang telah dengan sangat serius menjaga kawasan hutannya.

“Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, tapi untuk seluruh masyarakat binaan di KPH Toili Baturube yang semangat menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Sepriani.

Selain itu, Sepriani juga berharap penghargaan ini menjadi penyemangat untuk rekan seprofesinya agar lebih semangat dan termotivasi untuk melakukan yang terbaik.

“Penghargaan bukan hanya sebagai seremoni namun menjadi tanggung jawab kita di masa depan untuk terus menginspirasi, membina dan

mendampingi kelompok tani dalam mengelola sumber daya hutan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan tetap menjaga kelestarian,” harapnya.

Sementara itu, Edy Wicaksono, Program Manager PMU RBP GCF REDD+, mengapresiasi sosok Sepriani. Menurutnya, kekuatan beliau dalam pendampingan terlihat jelas hasilnya di kelompok masyarakat adat di Desa Maleo Jaya.

“Keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi hutan rakyat seluas 20 Ha di Desa Maleo Jaya yang melibatkan kelompok masyarakat adat, merupakan kerja keras pendampingan oleh Sepriani Jome dalam menggerakkan kelompok, terutama dalam

melibatkan perempuan. Ini pekerjaan yang cukup sulit, apalagi lokasi tersebut cukup jauh dari akses,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edy menyebut capaian kegiatan pengelolaan hutan lestari di KPH Toili Baturube sangat terlihat hasilnya, terutama pada pendampingan KTH non-PS, fasilitasi kerja sama usaha, penerbitan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPPUH) dan pelaksanaan rehabilitasi hutan serta lahan.

“Keberhasilan KPH Toili Baturube juga menjadi wajah dari keberhasilan seoran Sepriani, dan juga kelompok penyuluh kehutanan lainnya,” pungkasnya.



Mahyudin

Pelopop Penanganan Karhutla Berbasis Masyarakat

Oleh: Edy Wicaksono | Project Manager RBP REDD+ Sulteng

Deru mesin pompa air menyalak di tengah kepulan asap pekat yang menyelimuti kawasan Hutan Desa Sibualong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Di barisan paling depan, tampak seorang pria paruh baya sibuk mengarahkan selang dan mengomandoi warga sembari menembus hawa panas yang menyengat. Sosok itu adalah Mahyudin (55), seorang petani lokal sekaligus ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sibualong. Ia menjadi garda terdepan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tanggal 1-3 September 2026 silam.

Di usianya yang tidak lagi muda, semangat Mahyudin tak sedikitpun surut menghadapi kebakaran. Begitu titik api pertama terdeteksi di areal hutan desa, ia bergerak cepat mengonsolidasikan anggota LPHD dan warga setempat untuk beraksi mencegah api meluas. Lebih dari sekedar pemadam darurat, ia menjadi simpul koordinasi penting yang menghubungkan masyarakat desa dengan berbagai instansi resmi, seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran (DAMKAR), hingga Badan SAR Nasional (Basarnas).

“Kawasan hutan di desa ini adalah napas desa kami. Kalo rusak atau terbakar, yang merasakan dampaknya pertama kali ya warga Sibualong sendiri. Apalagi kebakaran juga meluas hingga ke Perkebunan warga, jadi kita tidak bisa cuma menunggu bantuan. Kami langsung bergerak sembari menghubungi instansi terkait,” jelas Mahyudin saat ditemui sehari setelah ia berhasil memadamkan kebakaran di wilayahnya (4/9/2026).





Dedikasi Mahyudin tidak hanya terlihat di lapangan. Secara sukarela, ia mengubah kediamannya menjadi posko kebakaran hutan desa. Rumahnya mendadak riuh setiap hari; mulai dari menjadi tempat rehat personel gabungan pemadam kebakaran, pusat komando strategi pemadam, hingga tempat penyimpanan logistik dan peralatan.

Tak berhenti disitu, Mahyudin juga aktif memelopori gerakan swadaya masyarakat melalui penggalangan bantuan peralatan dan bahan makanan. Mulai dari cangkul, pompa air, selang, air minum, hingga konsumsi harian untuk tim relawan dan petugas gabungan yang disediakan secara gotong royong oleh warga di posko kediamannya.

“Kami menggunakan peralatan seadanya yang ada di desa, seperti mesin pompa semprot, mesin pompa pencucian motor, selang dan sebagainya. Untuk konsumsi, ibu-ibu sigap mengumpulkan bahan sumbangan warga dan memasaknya untuk petugas dan warga lokal yang memadamkan api,” jelasnya.

Kehadiran sosok seperti Mahyudin di lapangan mendapat apresiasi yang tinggi dari petugas gabungan yang beroperasi di wilayah Donggala. Sinergi yang terbangun antara kesiapsiagaan warga lokal dan kekuatan instansi pemerintah terbukti efektif mempercepat proses pemadaman, serta menekan luasnya area hutan yang terbakar. Staff Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo, Godlife, turut memberikan apresiasi atas kontribusi Mahyudin dan warga Desa Sibualong, khususnya Lembaga Pengelola Hutan Desa “Peran Pak Mahyudin sangat besar dalam memelopori warga dan semua pihak dalam menangani kebakaran hutan,” ucap Godlife.

Bagi Mahyudin, menjaga keutuhan hutan Sibualong adalah warisan terbaik yang bisa ia tinggalkan untuk generasi mendatang. Apa yang dilakukan oleh Mahyudin dan warga Sibualong menjadi bukti bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan berbasis Masyarakat efektif untuk mencegah dan menangani Karhutla. (ews)

Kabar RBP SULAWESI TENGAH

